

Tabel Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2022-2023

No	Komoditas	2022	2023	% Pertumbuhan	Wujud Produksi
1	Kelapa	52.760,76	53.225,62	0,88	kopra
2	Tebu	6.410,79	6.137,39	-4,26	gula hablur
3	Kakao	1.900,72	1.820,66	-4,21	biji kering
4	Cengkeh	658,17	661,02	0,43	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	253,55	253,61	0,02	daun kering
6	Kopi	536,65	534,00	-0,49	biji kering
7	Jambu Mete	290,97	280,25	-3,68	biji kering
8	Tebu	198,12	151,04	-23,76	daun kering

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Pangan DIY, 2024

Tabel Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2022-2023

No	Komoditas	2022 (ekor)	2023 (ekor)	2023 (AU)
1	Sapi Perah	302.409	229.557	221.772
2	Sapi Potong	3.265	2.481	2.457
3	Kerbau	395	359	342
4	Kuda	1.615	1.114	1.698
5	Kambing	466.759	51.343	417.512
6	Domba	140.398	18.252	145.327
7	Babi	8.869	1.774	8.583
8	Ayam Buras	3.388.456	67.769	3.584.421
9	Ayam Ras Petelur	4.700.027	94.003	4.319.144
10	Ayam Ras Pedaging	6.779.116	135.586	6.122.516
11	Bik	444.009	13.300	491.692
	TOTAL	615.558		627.512

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Pangan DIY, 2024

#### 4. URUSAN KEHUTANAN

Capaian kinerja urusan kehutanan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2019 - 2023

No	Sub Elemen	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Hutan Non-Forest					
1.1	Kayu Bulat (m3)	63.038,63	2.249,84	2.566,26	2.070,67	2.215,00
1.2	Kayu Gelangan (m3)	6.171,34	3.913,62	2.982,38	2.827,58	3.429,79
1.3	Kayu Gelungan (m3)	1.086,12	22.788,69	7.500,71	8.868,97	9.362,11
1.4	Produk kayu hutan rakyat (m3)	149.378,22	69.086,70	95.220,48	91.124,99	60.513,97
2	Hasil Hutan Forest					
2.1	Bambu (batang)	127.310	4.822.205	13.500.254	13.550.000	13.500.000
2.2	Kayu Putih					
2.2.1	Jumlah Produk Dalam (Ton)	5.358,25	4.384,75	4.599,00	4.415,00	2.216,5
2.2.2	Jumlah Produk Luar (Ton)	39.323,00	40.313,00	42.317,00	40.160,00	19.529
2.2.3	Jumlah PAD (kg)	12.487.236,50	9.748.040,00	12.170.672,00	10.530.032,00	44.000,00
3	Luas Lahan Rehabilitasi					
3.1	Tanah (ha)	523,00	30,00	30,00	60,00	30,00
3.2	Rehabilitasi (ha)	523,00	20,00	30,00	60,00	30,00
4	Luas Lahan Pengalihan					
4.1	Pemukatan Baru (ha)	574,00	30,00	278,22	375,00	406,00
4.2	Pemukatan (ha)	0,00	n/a	30,00	30,00	n/a
5	Industri Pengalihan Hasil Hutan (unit)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
6	Produksi bahan tanaman bersertifikat yang diimpor (ton)	600.000,00	442.600,00	340.000,00	350.000,00	330.000,00
7	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86,70	85,64	86,68	86,68	86,68

Sumber: DLHK DIY, 2024

Berkurangnya jumlah PAD pada tahun 2023 berasal dari penyesuaian produk daun dan minyak kayu putih disebabkan karena harga penawaran yang masuk untuk lelang penjualan minyak kayu putih jauh di bawah harga dasar yaitu sebesar Rp 150.000,-/liter dan harga dasar sebesar Rp 220.000,-/liter, sehingga tidak ada penawaran dengan harga yang sesuai. Dengan pertimbangan besarnya permintaan pasar, dan keamanan penyimpanan minyak kayu putih, maka produksi minyak kayu putih dihentikan dengan jumlah minyak kayu putih sebanyak 10.529 liter. Penjualan minyak kayu putih dilakukan melalui koperasi dengan batas maksimal sebanyak 200 liter dengan harga per liter sebesar Rp 220.000,-. Selain itu, terdapat penurunan di beberapa elemen produk sektor kehutanan dikarenakan masih terbatasnya infrastruktur dan aksesibilitas pendanaan.

Tabel Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kehutanan

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	100%	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) terregistrasi yang memiliki akses legal sebanyak 45 KTH
2.	Pemertuaan kerucukan hutan perahun (deforestasi)	%	0	Pada tahun 2023 tidak terjadi perubahan fungsi hutan negara
3.	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi	%	6,20%	Akumulasi penanaman 2020-2023

Sumber: DLHK DIY, 2024

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan kehutanan di Pemda DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:  
a. Masih belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis dan ingginyah alih fungsi lahan.  
b. Kinerja pemangku hutan yang masih belum optimal dimana kondisi sebagian hutan di DIY yang merupakan hasil gerakan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2001-2003 telah cukup memiliki nilai ekologis sehingga berpotensi rana penurunan kualitas lingkungan di masa Pandemi Covid-19.  
c. Eksistensi hutan rakyat yang tergerus oleh maraknya alih fungsi menjadi lahan pemukiman.

#### 5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KINERJA URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI DIY TAHUN 2023



Sumber: Uraus PUIH/SUM/LIT./2024 (0404)

#### 6. URUSAN PERDAGANGAN

Kinerja sektor perdagangan ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor. Selama lima tahun terakhir, ekspor DIY menunjukkan tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ekspor dari tahun 2019 ke tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 17,81%. Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat USD 475,24 juta atau meningkat sebesar USD 71,84 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pakaian jadi bukan rajutan, perabot, penerangan rumah, barang-barang dari kulit merupakan tiga komoditas dengan kontribusi terbesar selama tahun 2023. Tiga Negara Tujuan Ekspor dengan kontribusi terbesar adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perkembangan ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dicermati pada tabel berikut:

Nilai Ekspor (Juta US \$)



Sumber: Disperdag DIY, 2024 (dolah)

#### 7. URUSAN PERINDUSTRIAN

Capaian kinerja urusan perindustrian yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di DIY Tahun 2019-2023

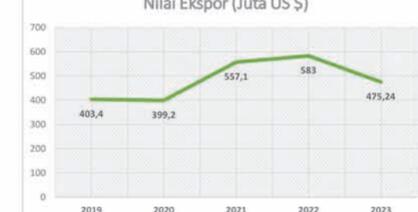


Sumber: Disperdag DIY, 2024 (dolah)

#### 8. URUSAN TRANSMIGRASI

Capaian kinerja urusan transmigrasi yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nilai Ekspor (Juta US \$)



Sumber: Disdiktrans DIY, 2024 (dolah)

#### E. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sebagaimana terdapat dalam dokumen RPO DIY tahun 2023-2026, terdapat 4 sasaran Pemerintah Daerah dengan 10 indikator Sasaran Pemerintah Daerah yang menjadi indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan manajemen Pemda DIY. Capaian indikator tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Pemerintah Daerah 2023

No.	IKM	2019	2020	2021	2022	2023
1	Unit usaha (UU)	97.013	96.597	96.954	98.408	102.787
2	Tenaga kerja (orang)	360.242	355.319	356.634	361.984	378.092
3	Nilai investasi (Rp juta)	2.084.560	1.992.422	1.999.794	2.029.791	2.120.117
4	Nilai produksi (Rp juta)	13.041.848	12.465.398	12.511.520	13.224.676	13.813.174
5	Nilai bahan baku dan perolehan (Rp juta)	7.537.467	7.204.311	7.230.967	7.339.432	7.666.037

Sumber: BAPPEDA DIY, 2024

Berdasarkan hasil realisasi capaian indikator sasaran atau indikator kinerja Utama Pemda DIY pada tahun 2023 menunjukkan dari 10 indikator kinerja, terdapat 6 indikator kinerja yang memiliki persentase capaian >100% terhadap target RPO DIY tahun 2023-2026. Namun, masih terdapat 6 indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan target. Meskipun demikian, beberapa indikator mengalami peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun 2022. Masih terdapat pekerjaan rumah yang menjadi permasalahan yang masih terselesaikan dan menjadi sumber di masyarakat yang akan kembangkan dan kembangkan.

Dari total 4 indikator yang telah tercapai, atau ketercapaiannya sama atau bahkan lebih dari 100% yaitu: 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 3) Opini BPK dan 4) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dari total 6 indikator yang belum tercapai atau tingkat capaiannya berada pada aras <100% yaitu: 1) Pertumbuhan Ekonomi, 2) Tingkat Pengangguran Terbuka, 3) Indeks Gini, 4) Indeks Williamson, 5) Tingkat Kemiskinan, dan 6) Indeks Pembangunan Kebudayaan. Dampak dari pandemi masih berpengaruh terhadap capaian kinerja, kenam indikator yang realisasinya belum sesuai target tersebut, selanjutnya perlu menjadi fokus Pemda DIY untuk peningkatan dan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. Urusan pencapaian dari masing-masing IKU Pemda DIY sebagaimana tersebut di atas, diformulasikan sebagai berikut.

#### F. HASIL EPDP DAN PINPATIAS LAPORAN KELOMPOK PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

- 1. Hasil EPDP tahun sebelumnya
  - a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 berhasil mendapatkan hasil EPDP dengan skor kinerja 3,62 dan status kinerja tinggi (peringkat ke-2 Nasional).
  - b. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6648 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 berhasil mendapatkan hasil EPDP dengan skor kinerja 3,53 dan status kinerja tinggi (peringkat ke-5 Nasional).

#### G. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

KODE	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	5.855.271.928.200,00	5.846.561.001.091,45	99,75	5.531.194.851.402,30
4.1	PENDAPATAN AKAH DAERAH (PAD)	2.348.708.268.700,00	2.349.376.512.625,85	100,00	2.243.431.314.469,58
4.1.1	Retribusi Daerah	2.088.461.616,00	2.091.951.202,00	99,71	1.929.644.480.212,61
4.1.2	Retribusi Daerah	13.544.239.750,00	13.121.251.202,00	96,95	38.249.581.473,02
4.1.3	Retribusi Daerah	199.973.113,00	199.973.113,00	100,00	199.973.113,00
4.1.4	Retribusi Daerah	177.132.310,00	177.132.310,00	100,00	188.674.703.847,00
4.1.5	Retribusi Daerah	2.148.708.268,70	2.148.708.268,70	100,00	2.243.431.314.469,58
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.476.563.659.500,00	3.496.930.178.423,00	100,60	3.292.761.049.934,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.476.563.659,50	3.476.563.659,50	99,71	3.292.761.049,93
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	879.504.200,00	879.504.200,00	100,00	879.504.200,00
4.3	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.1	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.2	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.3	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.4	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.5	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.6	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.7	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.8	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.9	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.10	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.11	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.12	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.13	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.14	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.15	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.16	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.17	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.18	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.19	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.20	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.21	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.22	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.23	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.24	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.25	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.26	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.27	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.28	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.29	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.30	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.31	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.32	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.33	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.34	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.35	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.36	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.37	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.38	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.000,00	7.393.634.014,00	100,00	10.042.044.758,72
4.3.39	LABA-LABA PENDAPATAN DAERAH	7.405.500.00			